

RINGKASAN

Keberhasilan Jepang dalam melaksanakan rehabilitasi setelah berlangsungnya Perang Dunia II, bahkan menjelma menjadi negara raksasa dalam bidang ekonomi dan industri menunjukkan betapa besarnya peranan negara ini untuk bangkit dari kehancuran. Mulai mencairnya hubungan politik antara Jepang dengan negara-negara di Asia Tenggara, menandakan terjadinya pencairan dari kebekuan kultural selama ini. Adanya perbedaan yang mendasar diantara Belanda dan Jepang yang sama-sama pernah menjajah Indonesia, dari sistem administrasi sipil pada masa Belanda menjadi dominasi militer pada masa pendudukan Jepang.

Masalah mendasar yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Sampai seberapa jauh sistem birokrasi yang diterapkan oleh Jepang berpengaruh terhadap pola dan aktivitas politik, (2) Mengapa gerakan yang mandiri dapat muncul dalam struktur birokrasi otoriter, (3) Bagaimana gerakan politik yang mandiri mensiasati struktur dan penerapan birokrasi Jepang yang otoriter, (4) Upaya apakah yang dilakukan Jepang dalam rangka mengontrol gerakan Politik rakyat.

Metodologi Penelitian ini adalah deskriptif analitis oleh karena tujuan yang ingin dicapai melakukan rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif melalui pengumpulan data, evaluasi dan verifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yang bersifat multidimensional.

Sistem pemerintahan yang diterapkan Jepang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1, tanggal 7 Maret 1942. Berdasarkan ketentuan tersebut Jepang menerapkan sistem birokrasi otoriter. Hal ini tercermin dalam struktur pemerintahan tunggal tanpa adanya kontrol dari perwakilan rakyat. Pada masa pendudukan Jepang gerakan politik yang muncul memiliki lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya sedangkan pola yang terjadi adalah memberikan dukungan kepada pemerintah Jepang dan dilain pihak melakukan perlawanan. Oleh karena itu terdapat gerakan politik yang moderat dan radikal. Kontrol terhadap gerakan politik, dilakukan melalui lembaga yang disponsori Jepang sendiri dan memanfaatkan pangreh praja.

Gerakan politik yang terjadi pada masa pendudukan Jepang berupa organisasi yang mendapat dukungan dari pemerintah dan organisasi mandiri yang muncul dari rakyat. Munculnya gerakan yang bersifat mandiri disebabkan karena organisasi yang dibentuk Jepang dianggap kurang militan sehingga tidak memenuhi harapan

masyarakat. Kontrol terhadap gerakan politik dilakukan Jepang melalui pembentukan lembaga-lembaga bersifat semi militer, militer dan juga organisasi kemasyarakatan seperti Tonari Gumi dan Kumiai. Pengaruh sistem birokrasi otoriter terhadap gerakan politik, bahwa Jepang melarang berdirinya gerakan politik termasuk partai politik. Tetapi di pihak lain pemuda, mahasiswa dan petani melakukan gerakan secara radikal bahkan melalui pemberontakan terhadap Jepang.